



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUZI MARSITAWATI
Jabatan : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

SUZI MARSITAWATI
NIP 196211061989102001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama : Suzi Marsitawati
 NIP : 196211061989102001
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	e-SAKIP	$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$	N/A	N/A	N/A	52.20	52.20	Nilai
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	1	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	e-SAKIP	Penambahan Luas RTH melalui proses pengadaan tanah untuk RTH (Hutan, Taman, Makam), selanjutnya dilakukan pembangunan terhadap RTH hutan, taman dan makam tersebut. Hutan kota adalah kawasan yang ditutupi pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan, tidak tertata seperti taman, dan lokasinya berada di dalam atau sekitar perkotaan. Pembangunan Hutan adalah proses membangun elemen softmaterial dan hardmaterial pada lahan hutan yang baru dibebaskan Taman Kota adalah sebuah ruang terbuka yang secara fungsional dan estetika merupakan sarana kota yang dapat memperbaiki kualitas kota baik secara fisik maupun psikis. Pembangunan Taman adalah proses membangun elemen softmaterial dan hardmaterial pada lahan taman yang baru dibebaskan Makam adalah ruang terbuka hijau yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana. Pembangunan Makam adalah proses membangun elemen softmaterial dan hardmaterial pada lahan makam yang baru dibebaskan. Cara menghitung target kinerja : (luas pengadaan tanah RTH/ luas daratan DKI Jakarta) x 100%	N/A	N/A	N/A	0,0181	0,0181	Persen

3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)</p> <p>2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan ouput $< 100\%$ Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%)</p> <p>3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (Nomor 29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (Nomor 29)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase

		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (Nomor 73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (Nomor 73)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel, serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City (Nomor 43)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Pengembangan Smart City (Nomor 43)	N/A	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	100%	N/A	100%	100%	100%	Persentase
7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
9	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (Nomor 71)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Pengendalian Pencemaran Udara (Nomor 71)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (Nomor 72)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (Nomor 72)	N/A	100%	100%	N/A	100%	Persentase
SASARAN KHUSUS											
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemrov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP
13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfo menyusun editorial plan di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfo.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.</p> <p>Perhitungan :</p> <p>a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan.</p> <p>d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta oleh Kementerian PAN dan RB (nilai 81)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	Predikat

15	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	e-Kinerja	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Cara penghitungan : Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30	N/A	N/A	N/A	92	92	Nilai
----	---	---	------------------------------	-----------	---	-----	-----	-----	----	----	-------

SASARAN OPERASIONAL

16	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 2021
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta,



Suzi Marsitawati
NIP 196211061989102001